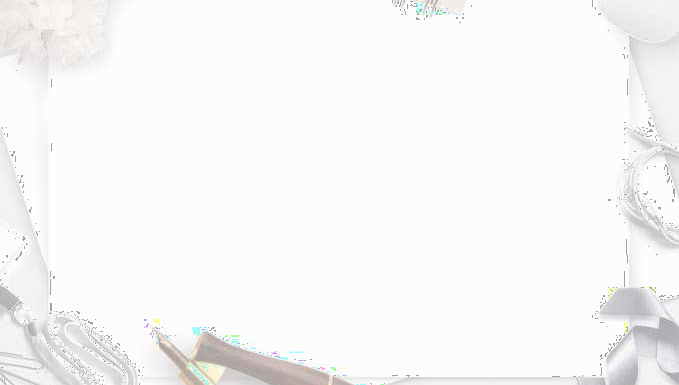


**Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Dosen Pengampu: Dra. Dian Kagungan, MH**

**SUMBER-SUMBER HUKUM**

A. Pengertian Sumber Hukum

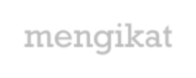
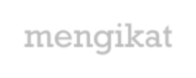
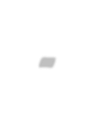
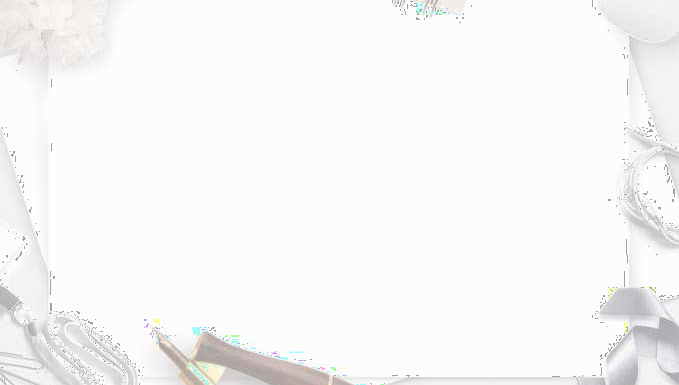
* Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan- aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan- aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.
* Dari buku “Mengenal Hukum”(Prof Dr. Sudikno S.H) sumber hukum dapat digunakan dalam beberapa arti : 1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatau yang menjadi permulaan hukum seperti kehendak Tuhan, akal manusia, dan jiwa bangsa 2. Hukum yang sekarang berlaku merupakan hasil produk dari hukum-hukum terdahulu 3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum 4. Sebagai sumber agar dapat mengenal dari mana hukum berasal misalnya undang- undang, dokumen, lontar, dan batu bertulis 5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum

## Pembagian sumber hukum secara umum

Secara umum hukum dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Hukum Formal yaitu sebagai tempat dimana ditemukan peraturan-peraturan hukum positif, yang menunjuk pada bentuk-bentuk peratuaran dan ketetapan. Terdiri atas: Undang-undang, Yurisprudensi, Traktat, Kebiasaan, dan Doktrin.
2. Hukum material yaitu sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dalam menetapkan hukum tersebut. dapat ditinjau dari segi ekonomi, agama, kesusilaan. Sejarah, filsafat,dll

## Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia



* UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
* Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
* Peraturan Pemerintah
* Peraturan Daerah

- Makna Peraturan Perundang-undangan adalah aturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat

* Dalam arti materiil: Semua aturan yang dibuat oleh organ negara dan mengikat masyarakat (peraturan perundang-undangan)
* Dalam arti formal: Hanyalah peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat sebagai undang-undang

## Kekuatan mengikat UU

* Agar suatu UU mempunyai kekuatan mengikat dan dapat nerlaku, maka harus di

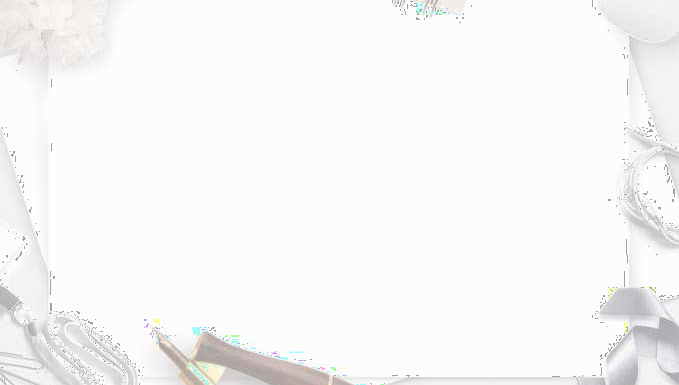
undangkan di lembaran negara, dan yang mengundangkan adalam menhukam.

* Setiap UU yang telah diundangkan melalui LN maka akan berlaku fiksi hukum: “setiap orang dianggap telah mengetahui adanya UU yang telah diundangkan tersebut.”
* Setiap UU selalu disertai dengan penjelasan, penjelasan suatu UU dan Peraturan

Pemerintah dimasukkan dalam Tambahan Lembaran Negara.

* Setiap UU diberi nomor urut dan tahun dibentuknya, demikian pula Lembaran Negara diberi nomor urut dan tahun, tahun dibentuknya UU dan LN sama. Tetapi nomor urut biasanya berbeda.
* Suatu UU mulai berlaku sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam UU itu sendiri. Apabila tidak ditentukan maka UU tersebut akan mulai berlaku 30 hari (Jawa dan Madura) dan 100 hari (diluar jawa dan Madura) setelah diundangkan dalam LN.

## Sifat dan tata urutan perundang- undangan

* UU Dapat bersifat formil serta materil, misal UU No. 5 thn 1960 tentang UUPA:
* Dalam arti formil karena UU tersebut dibuat pemerintah dengan DPR
* Dalam arti materil karena UU tersebut mengikat umum.

Dapat pula memiliki 1 sifat saja seperti UU naturalisasi yang bersifat formil karena dibuat oleh presiden dan DPR, dan Kepmen yang hanya bersifat materil mengikat umum tetapi tidak dibuat oleh DPR.

* Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 ayar 1:

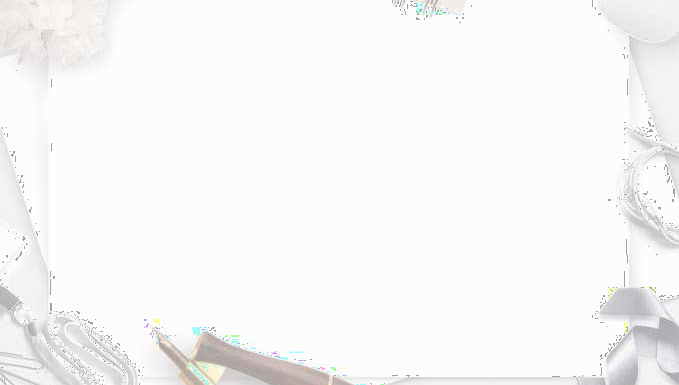
- UUD 1945

* Ketetapan MPR
* UU atau Peraturan pemerintah pengganti UU
* Peraturan pemerintah
* Peraturan presiden
* Peraturan Daerah Provinsi, dan
* Peraturan Daerah Kabupaten

## Akibat dari perbedaan tingkatan perundang-undangan

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh yang lebih rendah, tetapi sebaliknya.
2. Hal-hal yang harus diatur dengan suatu bentuk peraturan perundang-undangan tertentu tidak mungkin diatur oleh yang lebih rendah.
3. Isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat bertentangan dengan yang lebih tinggi.
4. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Sebaliknya tidak mungkin.

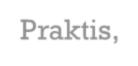
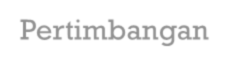
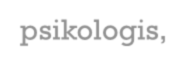
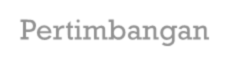
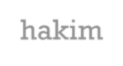
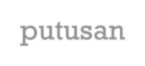
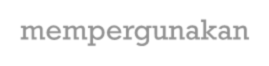
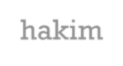
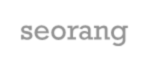
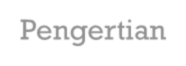
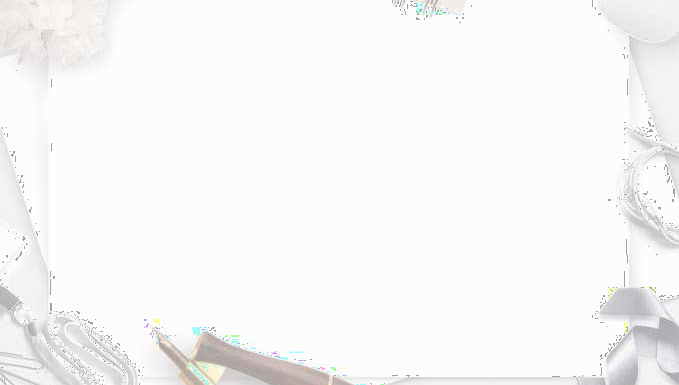
# TIDAK BERLAKUNYA UU DAN ASAS- ASAS PERUNDANGAN YANG DIKENAL

* Jangka waktu yang ditentukan dalam UU tersebut sudah lampau.
* Keadaan untuk mana UU tersebut diadakan sudah tidak ada lagi.
* UU tersebut telah dicabut oleh instansi yang membuatnya.
* Telah diadakan UU yang baru yang isinya bertentangan dengan UU yang berlaku.
* UU Tidak berlaku surat
* UU tidak boleh diganggu gugat
* UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi kedudukannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
* UU yang berlaku kemudian membatalkan UU terdahulu.
* UU khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum.

Pengertian

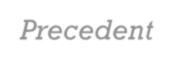
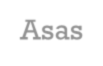
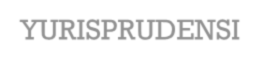
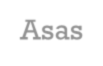
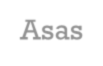
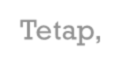
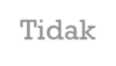
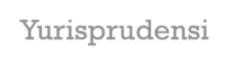
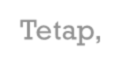
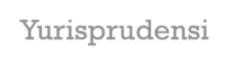
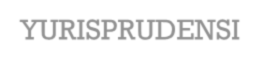
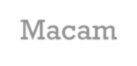
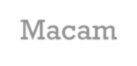
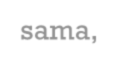
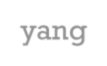
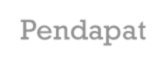
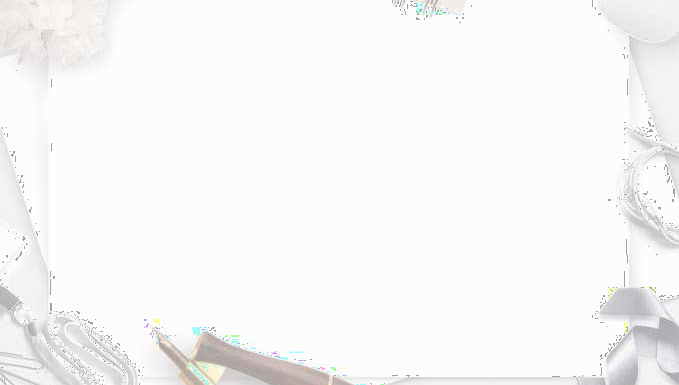
Yurisprudensi

Putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri yang kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam memutuskan perkara yang sama.



Sebab-Sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain :

* + Pertimbangan psikologis, biasanya dikarenakan hakim bawahan yang segan untuk tidak mengikuti putusan hakim yang mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum ,terutama pada keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
  + Pertimbangan Praktis, maksudnya adalah apabila hakim terdahulu sudah menjatuhkan putusan yang terlebih sudah dibenarkan/dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya menggunakan putusan yang sama terhadap kasus atau perkara yang sama.
* Pendapat yang sama, maksudnya adalah dikarenakan hakim yang bersangkutan mempunyai pendapat yang sama dengan keputusan hakim lain yang dahuhu terlebih apabila isi dan tujuan UU sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial yang ada, maka dilumrahkan apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan.



Macam-Macam YURISPRUDENSI

* Yurisprudensi Tetap, yaitu keputusan-keputusan hakim yang berulang kali

dipergunakan pada kasus atau perkara yang sama.

* Yurisprudensi Tidak Tetap, yaitu yurisprudensi yang belum masuk menjadi

yurisprudensi tetap

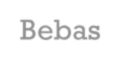
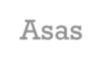
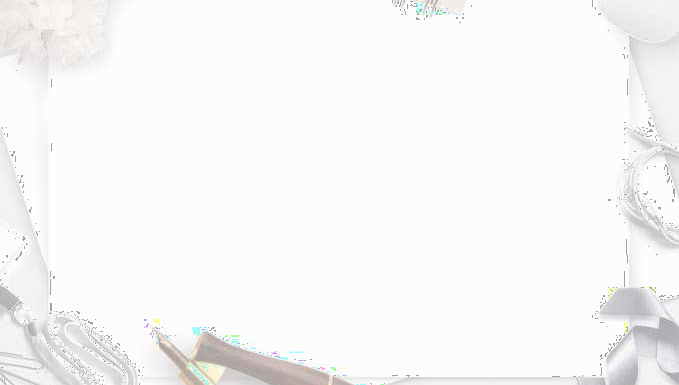
Asas-Asas YURISPRUDENSI

1. Asas *Precedent*

* Hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu dari hakim yang sama derajatnya

atau dari hakim yang lebih tinggi.

* Dianut oleh negara Anglo Saxon (Inggris, Amerika Serikat)
  + Asas *precedent* berlaku berdasarkan 4 faktor, yaitu:



* 1. Bahwa penerapan dari peraturan yang sama pada kasus yang sama menghasilkan perlakuan yang sama, bagi siapa saja/yang datang/mengahadap peradilan.
  2. Bahwa mengikuti precedent secara konsisten dapat menyumbangkan pendapatnya dalam masalah-masalah di kemudian hari.
  3. Bahwa penggunaan kriteria yang baik untuk menempatkan masalah-masalah

baru dapat menghemat wakt dan tenaga.

* 1. Bahwa pemakaian putusan terdahulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati kebijaksanaan dan pengalaman dari pengadilan pada generasi sebelumnya.

1. Asas Bebas
   * Petugas peradilan tidak terikat pada putusan-putusan hakim sebelumnya pada

tingkatan sejajar maupun hakim yang lebih tinggi.

* + Dianut oleh negara Belanda dan Perancis.
  + Dalam praktiknya, penggunaan asas ini masih belum konsekuen dan masih menggunakan putusan-putusan hakim yang lain.

## Traktat

Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih tentang persoalan tertentu yang menjadi sebuah kepentingan negara yang bersangkutan dalam pelaksanaannya. Traktat merupakan perjanjian yang bersifat internasional dan bentuk perjanjian ini digunakan pada perjanjian yang memiliki sifat multilateral.

Menurut **Prof Dr.Mochtar Kusumaatmadja**

Traktat adalah suatu perjanjian yang di adakan oleh antar bangsa yang

memiliki tujuan untuk menciptakan berbagai akibat hukum tertentu.

Traktat dapat digolongkan berdasarkan jumlah pihak yang ikut serta. Dalam "perjanjian bilateral" dibuat antara dua negara, sementara "perjanjian multilateral" adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Namun, terdapat pula perjanjian bilateral yang melibatkan lebih dua negara apabila perjanjian tersebut memiliki struktur bilateral, dalam kata lain perjanjian tersebut disepakati oleh sejumlah negara di satu pihak dan sejumlah negara lainnya di pihak lain.

* 1. **Traktat Bilateral** Traktat bilateral adalah sebuah perjanjian yang diselenggarakan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak.



* 1. **Traktat Multilateral** Traktat Multilateral sebagai sebuah perjanjian yang dijalankan oleh banyak negara dengan tujuan untuk mengatur kepentingan bersama negara-negara yang ikut dalam perjanjian tersebut.
  2. **Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka** Traktat kolektif adalah sebuah perjanjian yang

dijalankan oleh beberapa negara atau multilateral lalu terbuka untuk negara lain yang terikat dengan perjanjian itu.

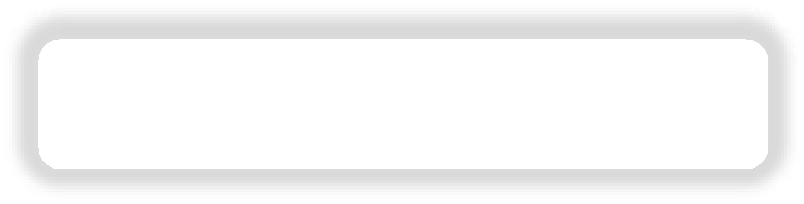
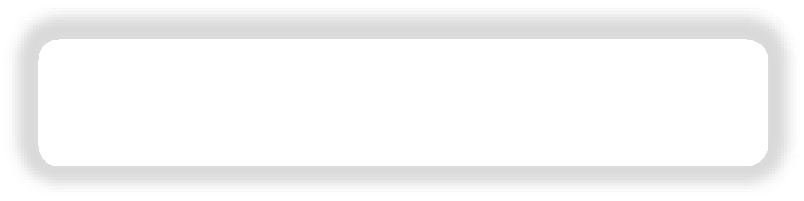
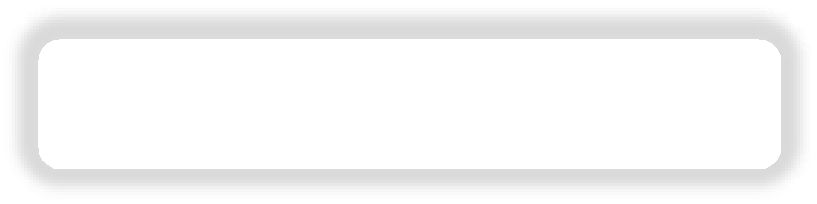
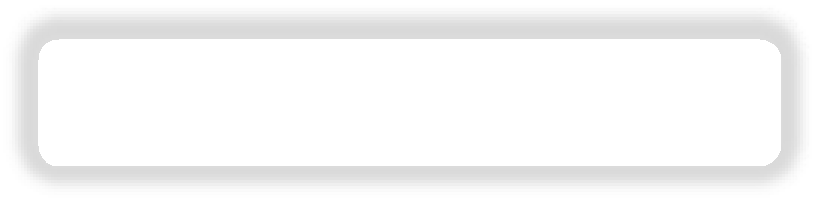
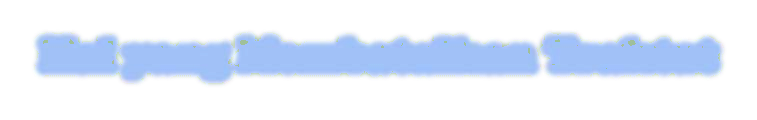
### Hal yang Membatalkan Traktat

Terjadi kecurangan

Terdapat pihak-pihak yang dirugikan

Adanya pelanggaran Punahnya salah satu pihak

Terdapat ancaman dari sebelah pihak



Sudah tercapainya dari tujuan perjanjian tersebut

Kebiasaan

Secara umum hukum kebiasaan adalah tata cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama. Hukum ini memberi pedoman bagi masyarakat untuk berfikir dan bersikap untuk menghadapi berbagai hal dalam kehidupan.

Kebisaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang ulang dalam hal yang sama.apabila suatu kebiasaan itu diterima di masyarakat dan diulang ulang sedemikian rupa,sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut dianggap sebagai tindakan yang melanggar,dan timbulah suatu kebiasaan yang dipandang sebagai hukum.

Contohnya adalah jika ada seseorang yang melakukan tindak asusila,lalu pelakunya dihukum sesuai yang biasa berlaku di lingkungan masyarakatnya Namun tidak semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yang baik dan adil,oleh sebab itu belum tentu suatu kebiasaan dapat dijadikan hukum formal.

Agar ditaati syarat kebiasaan adalah merupakan perbuatan yang tetap dilakukan orang dan terdapat keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan karena merupakan kewajiban.

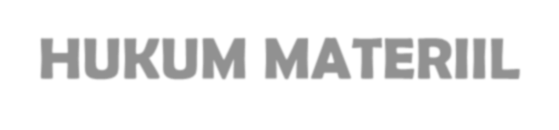
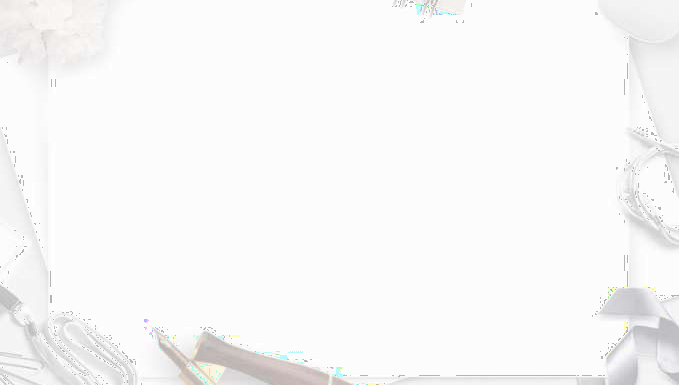
## Doktrin

* + - Doktrin adalah pendapat para Sarjana Hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara.
    - Menurut Prof. Dr. Sudikno M. SH. (1986 : 94), Doktrin adalah pendapat para Sarjana Hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya.
    - Biasanya hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada undang- undang, perjanjian internasional, dan yurisprudensi, namun apabila ketiga sumber tersebut tidak dapat memberi jawaban mengenai hukumnya, maka hukumnya dicari dari pendapat para Sarjana Hukum atau Ilmu Hukum. Ilmu Hukum adalah sumber hukum yang yang tidak mengikat tetapi mendapat dukungan dari para Sarjana Hukum.



* + - Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum formil, jadi untuk dapat dijadikan sumber hukum formil haruslah doktrin yang telah menjadi putusan hakim.

# HUKUM MATERIIL



Sumber

hukum

materiil

merupakan yang pembentukan

faktor-faktor

membantu

isi

hukum

(pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dsb)

Artinya

tempat

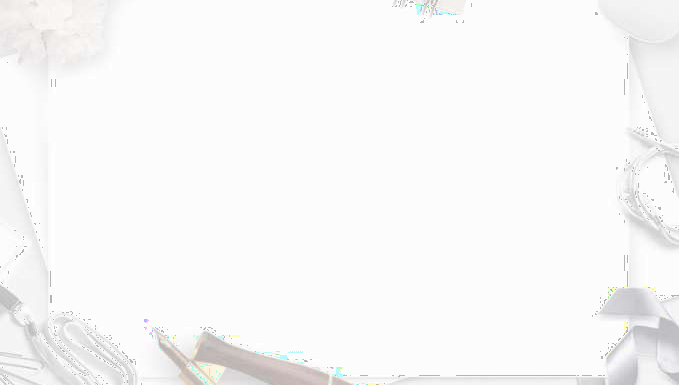
dari

mana materi/isi hukum

itu diambil

Ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, hubungan sosial, hubungan politik, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu- lintas), perkembangan internasional, dan keadaan geografis.

**Faktor yang membantu pembentukan hukum**



Faktor Idiil

Faktor Kemasyarakatan

Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan- aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan.

Contohnya struktur ekonomi, kebiasaan,

adat istiadat, dll.

## Jenis Sumber Hukum Materiil

* + Sumber Hukum Historis (rechtsbron in historischezin) adalah tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Sumber hukum ini dibagi menjadi dua,yaitu :
    1. Sumber hukum yg merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara historis : dokumen-dokumen kuno, lontar, dll.
    2. Sumber hukum yg merupakan tempat pembentuk UU mengambil hukumnya.
  + Sumber Hukum Sosiologis (rechtsbron in sociologischezin) merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya : keadaan agama, pandangan agama, dan kebudayaan.
  + Sumber Hukum Filosofis (rechtsbron in filosofischezin) sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua :

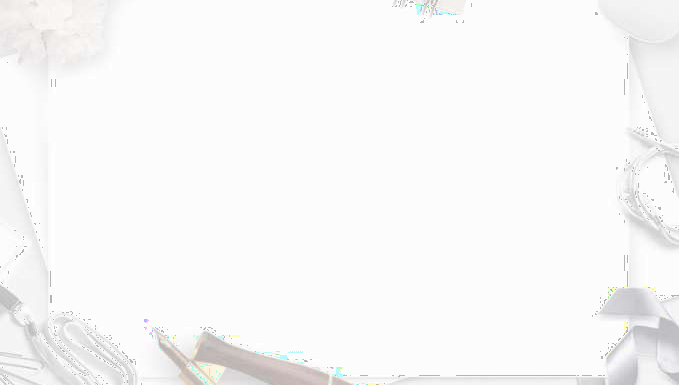
## Jenis Sumber Hukum Materiil

* + Sumber Hukum Filosofis (rechtsbron in filosofischezin) sumber hukum ini dibagi lebih lanjut menjadi dua :

1. Sumber isi hukum; disini dinyatakan isi hukum asalnya darimana. Ada 2 pendapat tentang isi hukum ini. Yang pertama menurut Van

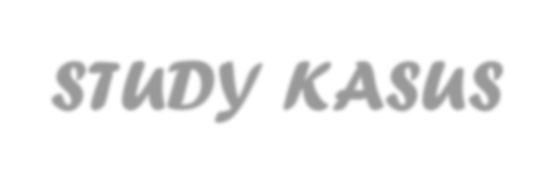
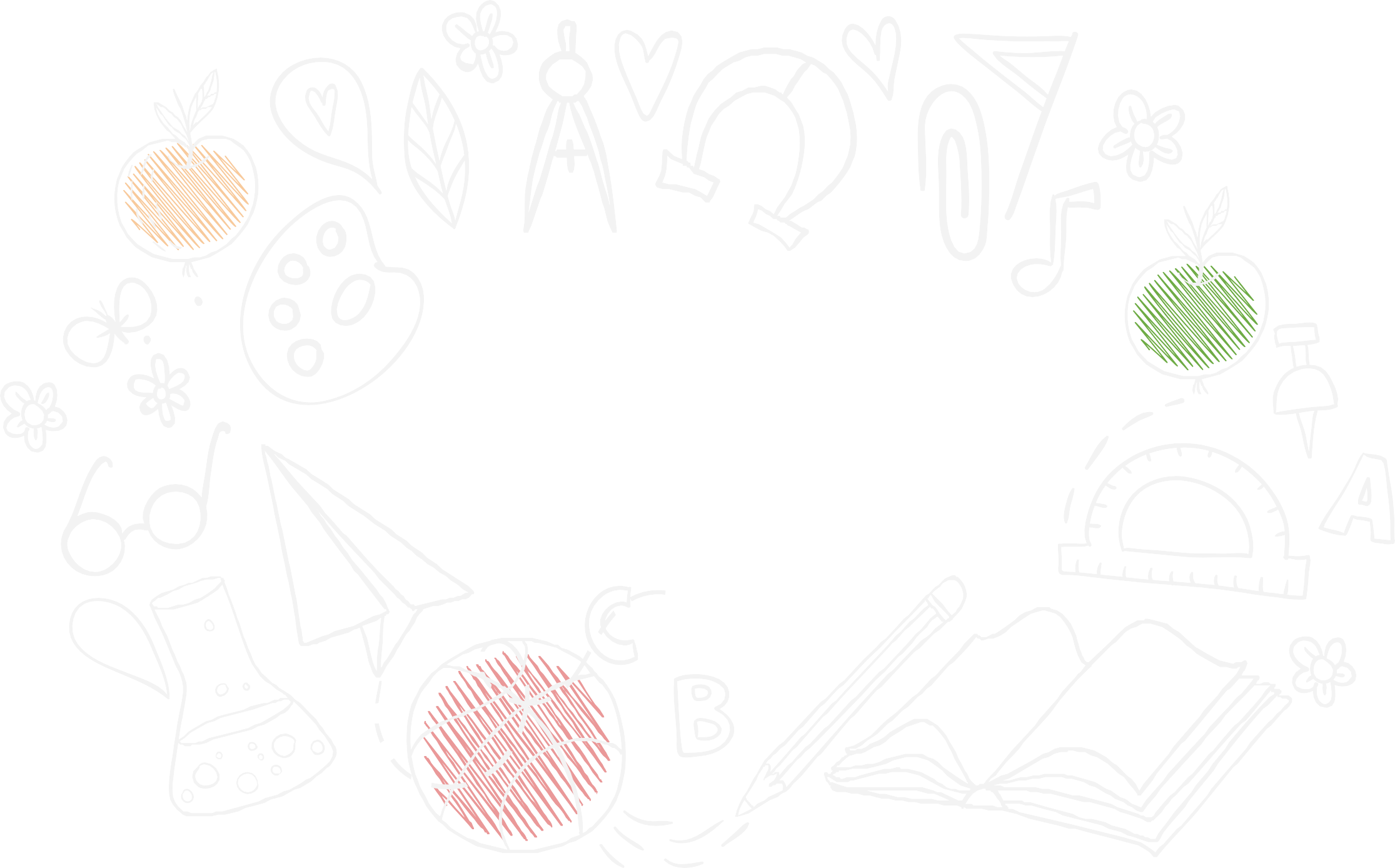
Apeldoorn tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini yaitu :

* 1. Pandangan theocratis, menurut pandangan ini hukum berasal dari Tuhan
  2. Pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini isi hukum berasal dari akal manusia
  3. Pandangan mazhab historis; menurut pandangan isi hukum berasal dari kesadaran hukum.



Pendapat kedua berasal dari Marhaenis (1981), yaitu :

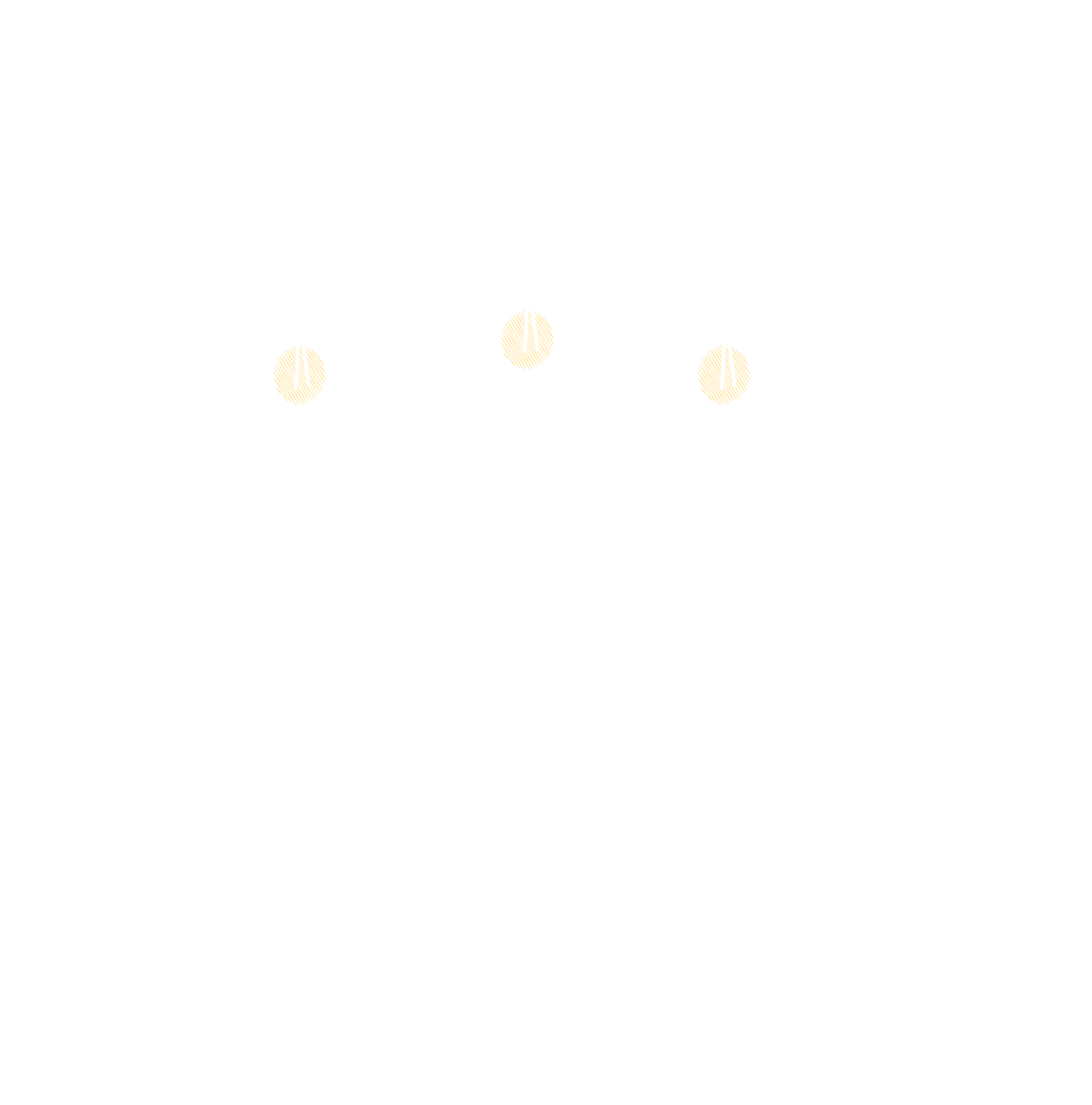
1. KUH pidana segi materiilnya ialah mengatur tentang pidana umum, kejahatan pelanggaran.
2. KUH Perdata dari segi materillnya mengatur tentang masalah orang sebagai subyek hukum, barang sebagai obyek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa.
3. Sumber kekuatan mengikat dari hukum yaitu mengapa hukum mempuyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum.



*STUDY KASUS*

Undang-undang No.7 Tahun 2020

tentang Mahkamah Konstitusi



Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi mengajukan judicial review atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Koalisi Selamatkan MK terdiri atas sejumlah organisasi yakni Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Koalisi menilai, penyusunan UU Mahkamah Konstitusi cacat formil karena proses pembentukan yang terburu-buru, yakni dalam waktu 3 hari serta dilakukan secara tertutup di tengah pandemi Covid-19.

kasus ini berkaitan dengan materi sumber hukum karena terdapat uji formil dan materi dalam kasus ini yang dilakukan oleh sejumlah organisasi.

Menurutnya ada 6 permasalahan formil serius dalam penggarapan UU MK ini. Maksud dari formil yakni, sebagai tempat ditemukan nya peraturan-peraturan hukum positif, yang menunjuk pada bentuk-bentuk peratuaran dan ketetapan.

Terdiri atas: Undang-undang, Yurisprudensi, Traktat, Kebiasaan, dan Doktrin.

1. Pembahasan dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan publik, dan terkesan

tergesa gesa

1. Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK
2. RUU tidak memenuhi syarat carry over
3. Pembentukan UU melanggar asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yakni, ketidakjelasan tujuan, kedaya dan hasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan
4. Naskah akademik RUU MK dinilai hanya sekedar formalitas
5. RUU MK berdasar pada UU yang invalid, yakni UU No.4 Tahun 2014 tentang penetapan perppu No.1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang undang MK. UU tersebut telah dibatalkan MK tahun 2014 lalu

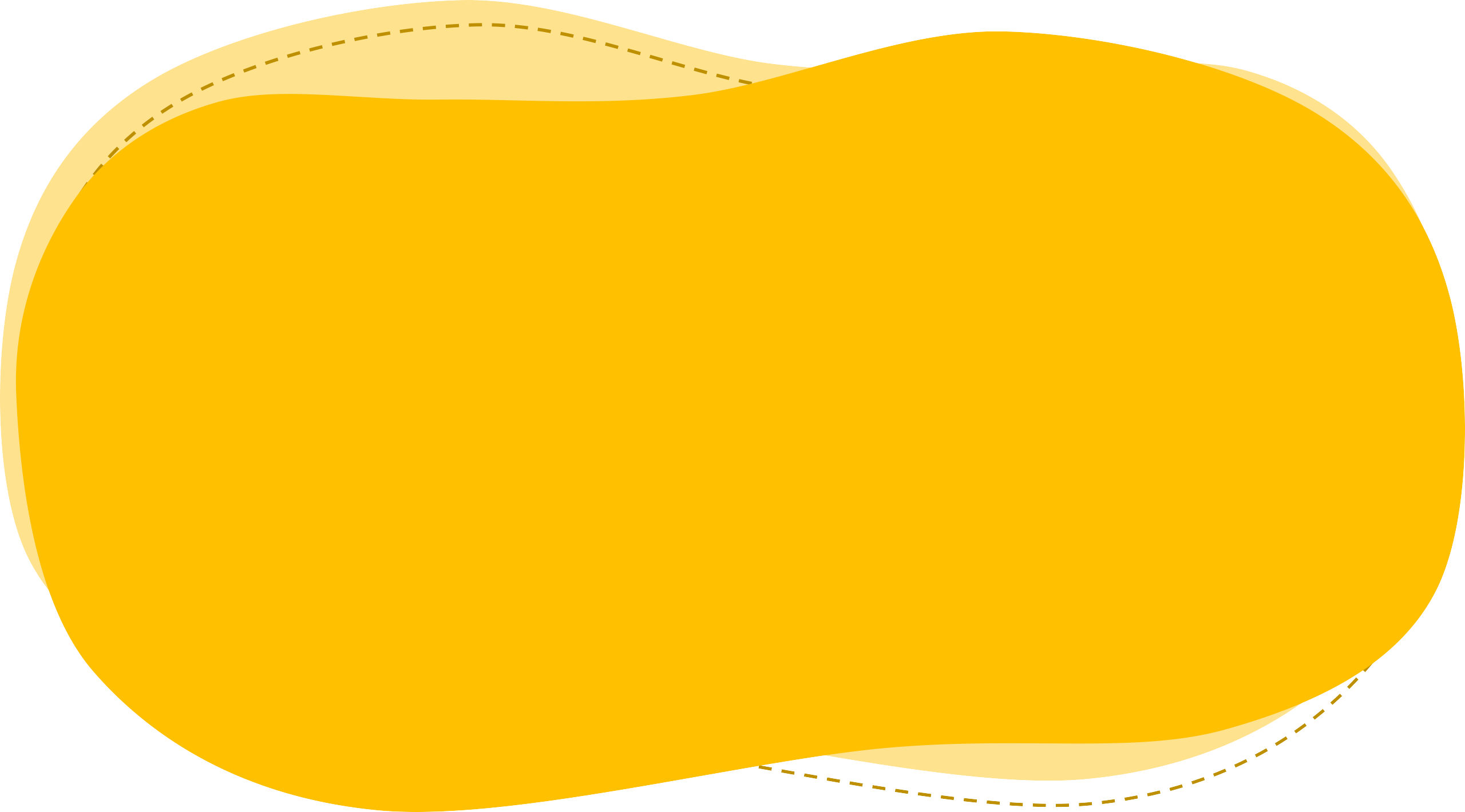
Koalisi juga menilai pengabaian prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pembentukan UU MK menghasilkan materi muatan yang jauh dari penguatan kelembagaan dan kewenangan MK. Koalisi mengajukan uji materiil yang berkaitan dengan 5 poin. Maksud dari materiil yaitu, sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dalam menetapkan hukum tersebut. Dapat ditinjau dari segi ekonomi, agama, kesusilaan. Sejarah, filsafat,dll. Kasus ini menguji materil antara lain:



1. Meminta pendaftaran dan pencalonan hakim konstitusi harus terbuka seluas-luasnya untuk semua negarawan
2. Meminta MK menafsirkan sistem rekrutmen hakim konstitusi untuk berlaku secara seragam dan dengan standar yang sama pada setiap lembaga pengusul yakni DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden.
3. Usia minimal hakim Konstitusi harus dikembalikan ke usia yang lebih muda (47 tahun)

agar terdapat regenerasi dan membuka peluang yang lebih luas.

1. Putusan MK harus dianggap sebagai sumber hukum dan aktor yang menindaklajuti harus perlu diperluas, tidak hanya DPR dan Pemerintah, tetapi juga setiap lembaga negara dan pihak-pihak terkait.
2. Perpanjangan masa jabatan wajib berlaku untuk hakim konstitusi yang menjabat pada periode selanjutnya untuk menghindari konflik kepentingan dan menghindari upaya penundukkan MK.



Thank you!